

pula, setiap kebijakan akan berdampak juga pada posisi dan pengaruhnya kemudian. Pendek kata, keberhasilan atau kegagalan Presiden Obama akan ditentukan oleh kecanggihan politiknya ketika dia memilih kebijakan-kebijakannya.

Apakah orang Indonesia bisa belajar dari sejarah ini? Jawaban saya adalah ya, tetapi saya khawatir jawaban Goenawan adalah tidak, sebab kerangka analitisnya terlalu mengandalkan para pejuang di luar sistem. Tanpa mengabaikan peran positif kaum pejuang, fokus utama kita (pengamat dan aktivis) seharusnya diarahkan kepada aktor-aktor pokok: pejabat pemerintah pusat (termasuk hakim dan jaksa), pemimpin partai, dan anggota badan-badan legislatif. Tak kalah penting, pemerintahan daerah juga ikut menikmati proses demokratisasi di zaman Reformasi ini. Pemerintah-pemerintah daerah, di tingkat kabupaten dan kota, adalah lembaga demokratis yang paling dekat kepada masyarakat. Bagi saya, keberhasilan atau kegagalan demokrasi di Indonesia akan lebih ditentukan oleh tingkah-laku politisi kabupaten dan kota ketimbang para pejuang di luar sistem. Akan tetapi, mengingat sekali lagi kata-kata Max Weber, jangan terlalu berharap dalam waktu singkat. Kayu Indonesia pasti tidak kalah keras dibanding kayu Amerika.***

Mengaktifkan Politik

Rocky Gerung

Pidato Goenawan Mohamad (GM) menyentuh kondisi teoretis dari filsafat politik. Yaitu "ketakcukupan" demokrasi sebagai peralatan untuk menghasilkan "perubahan radikal". Kritik ini adalah khas "etika politik kiri". Karena jalan pikiran itu, GM sempat berpikir bahwa demokrasi mengandung disilusi di dalam dirinya.

Memang, dalam praktik, demokrasi lebih sering berhenti dalam "pelembagaan formal", ketimbang mensponsori "revolusi". Saya kira, dalam kondisi reformasi sekarang ini, kita harus menerangkan juga demokrasi dari sudut pandang kebutuhan kontemporer kita untuk menghalangi pemaknaan "The Real" ("Sang Antah"—dalam istilah GM), dari kemungkinan pengisiannya secara absolut oleh politik doktrinal, politik fundamental. Jadi, secara strategis, ada kebutuhan "politico-historis" yang lebih mendesak, di samping kebutuhan "filosofis" mempersoalkan struktur metafisik dari teori demokrasi.

GM telah mengucapkan sesuatu yang lebih "kontemplatif". Karena itu, tanggapan saya sebaiknya yang lebih bersifat "mengaktifkan" demokrasi. Terimakasih.

Demokrasi adalah hasrat yang tak pernah sampai. Tapi kendati ia tidak mencukupi, kita tetap memerlukannya. Utilitasnya memang tidak diukur melalui ambisi etisnya: "dari, oleh dan untuk rakyat", melainkan dengan kenyataan teknisnya: jumlah konsensus minimal "suara rakyat". Konsensus itulah yang dipertandingkan melalui Pemilu. Prinsip kerasnya adalah: *the winner takes all*. Tapi format 51:49 ini—berkat prinsip HAM, yaitu pelajaran kemanusiaan yang kita peroleh dari dua kali kekerasan Perang Dunia — tidak boleh mengancam hak-hak dasar kebebasan individu. Artinya, "sang mayoritas" tidak boleh semau-maunya menentukan "isi politik" sebuah masyarakat. Batas dari demokrasi adalah hak asasi manusia. Rasionalitas ini kita perlukan untuk mencegah politik mayoritas memanfaatkan instalasi demokrasi menjadi saluran totalitarianisme. Begitulah konsensus mutakhir penyelenggaraan demokrasi.

Memang, dalam praktik, demokrasi cenderung melahirkan oligarki, karena prosedur teknis elektoral (koalisi, *electoral treshold*) memungkinkan terjadinya transaksi politik *status quo*. Tetapi secara substansial, demokrasi juga tetap bertumpu pada prinsip "keutamaan warganegara", yaitu jaminan filosofis bahwa politik tidak terbagi habis dalam *electoral politics*. Artinya, kewarganegaraan tidak boleh direduksi ke dalam mekanisme politik Pemilu, yaitu dengan membagi habis seluruh warganegara menjadi anggota partai politik.

Dalam demokrasi, status ontologi warganegara lebih tinggi dari keanggotaan partai politik. Tidak ada demokrasi tanpa warganegara, tetapi politik dapat terus diselenggarakan tanpa partai politik. Karena itu, politik perwakilan tidak boleh menghilangkan prinsip primer demokrasi, yaitu

"keutamaan warganegara". Partai politik, juga parlemen, hanyalah salah satu alat warganegara untuk menjalankan politik. Karena itu, "alat" tidak boleh membatasi "tujuan". Demokrasi tetaplah berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan partai. Jadi, demokrasi, di dalam dirinya, memiliki imperatif metapolitik untuk menjamin kedaulatan warganegara. Sesungguhnya, ketegangan antara *electoral politics* dan *citizenship politics* inilah yang menjadi problem dari sistem demokrasi.

Problem ini menghasilkan konsensus: demokrasi bukan ideal "terbaik" pengaturan politik, tetapi ia yang "termungkin" untuk menjamin kesetaraan hak dan kebebasan warganegara. Dengan jaminan itu, terbuka peluang bagi sirkulasi elit dan perubahan susunan politik. Artinya, kendati ada tendensi oligarki dalam demokrasi, tetapi hanya pada demokrasilah dimungkinkan terjadinya koreksi politik secara sistemik. Filsafat di belakang konsensus ini adalah kondisi falibilis manusia, yaitu penerimaan sederhana tentang ketaklengkapan manusia, tentang ketidaktahuannya, dan karena itu: tentang potensinya untuk berbuat salah. Dengan sudut pandang ini, demokrasi tidak berambisi memfinalkan kebenaran politik. Karena itu setiap obsesi absolutis untuk memfinalkan politik harus disingkirkan. Falibilisme adalah dasar untuk setiap antropologi politik sekular, yaitu pandangan bahwa "kebaikan" dan "keadilan" harus selalu diukur pada kondisi kesejarahan manusia. Dari kondisi falibilis inilah demokrasi menyelenggarakan toleransi dan pluralisme.

Toleransi berarti penyelenggaraan politik tanpa penghakiman moral. Toleransi adalah kesepakatan untuk menerima kemajemukan nilai dan pandangan hidup secara horisontal. Dengan prinsip ini demokrasi sekaligus meng-

antisipasi berbagai kemungkinan perubahan nilai dan pandangan hidup di dalam masyarakat. Dengan cara ini, "isi politik" suatu masyarakat terhindar dari finalisasi dogmatis.

Toleransi adalah keindahan tertinggi dari demokrasi. Pada titik ini sebetulnya kita dapat menyelenggarakan demokrasi secara langsung, yaitu dalam pergaulan sosial warganegara. Proyek demokrasi memang terletak pada upaya untuk mengaktifkan politik pada pergaulan langsung antar warganegara. Sesungguhnya, etika politik terbentuk dari penyelenggaraan toleransi itu. Dalam kultur itulah kesetaraan dan kebebasan dirawat untuk tumbuh menjadi apa yang pernah disebut oleh Alexis de Tocqueville sebagai *habits of the heart*. Demokrasi yang tumbuh dalam toleransi akan menetap dalam kebudayaan, dan menjadi etika politik yang otentik. Jadi, tetaplah demokrasi dapat diselenggarakan tanpa melulu harus melalui politik perwakilan.

Keterbatasan demokrasi ada pada fasilitas konsensual yang ia sediakan. Demokrasi memang hanya mengolah kebenaran politik di antara mereka yang berkonsensus. Bahkan lebih sempit lagi, konsensus itu harus diwakilkan pada hanya segelintir orang melalui sistem perwakilan politik, dan itu berarti terbuka peluang untuk praktik oligarki. Keberatan inilah yang dieksploitir oleh "politik kiri" dan kalangan "posmodernis" untuk mendekonstruksi demokrasi dengan mengujinya melalui rumpun teori *hegemony* (oleh politik kiri) dan prinsip *anything goes* (oleh politik posmodernis). Politik kiri melakukan "penidakan"

pada demokrasi dengan mengaktifkan "antagonisme" dalam relasi kebenaran. Percobaan semacam ini memang berguna untuk mengadvokasi kaum "disensus" agar terus mempertanyakan ruang hegemoni oligarki itu. Dalam proposal politik kiri, ruang itu harus dikosongkan dari konsensus oligarkis, dan demi itu perjuangan politik menjadi permanen.

Persoalannya adalah bahwa politik kiri selalu membutuhkan "kebenaran" yang monumental, sekaligus momentual, untuk mengakses ruang kosong demokrasi. Itu berarti suatu prakondisi historis harus berlangsung lebih dahulu di luar sistem demokrasi, sebelum perjuangan politik itu diarahkan pada para pemegang konsensus oligarkis. Sialnya, dalam sejarah, kebenaran monumental itu baru dapat kita mengerti setelah momennya selesai. Jadi selalu ada "keterlambatan historis", keterlambatan momentum dalam politik kiri yang menyebabkan hilangnya energi politik ketika diperlukan untuk menjalankan perubahan politik radikal. Itulah sebabnya sifat perubahan yang terjadi dalam politik kiri sering hanya berkadar "kuantitatif" dan bukan "kualitatif". Monumen politik kiri selalu kita dirikan setelah momen radikalnya berlalu.

Politik posmodernis menantang demokrasi juga pada sifat konsensualnya. Tapi bukan pertama-tama pada struktur oligarkinya, melainkan pada pendasaran kebenaran yang semata-mata rasional. Demokrasi memang mengandalkan transaksi politik melalui fasilitas *reason*. Pada politik posmodernis, fasilitas ini telah diabrak-abrik oleh kondisi *playfulness* dari "kebenaran", yaitu kondisi politik yang menerima aneka ideologi sebagai permainan kebudayaan semata-mata, dan karena itu kebebasan dapat dinikmati sepenuhnya di luar sistem politik kebenaran. Sa-

mudera politik posmodernis terbentuk oleh berbagai imajinasi mikro, yang terus mengapung dalam medan *playfulness* itu, tanpa dapat tenggelam di dasar absolutisme.

Di sini, sentimen ideologi tidak lagi diperlukan karena pendasaran-pendasaran politik identitas telah mengalami fragmentasi mengikuti pluralisasi isu dan lokasi. Dalam kondisi kebudayaan yang fragmentaristik itu, semua hubungan sosial—dari dunia hiburan sampai sidang parlemen—memang mengandung eksploitasi politik. Tapi sekaligus di dalam sistem fragmentasi itu, perlawanan politik dapat berasal dari segala arah, dan diselenggarakan dalam segala waktu. Dalam pandangan posmodernis, perjuangan demokrasi haruslah merupakan perjuangan untuk menikmati pluralisasi identitas, fragmentarisasi kebudayaan dan hibridisasi kebenaran.

Demokrasi memang memerlukan radikalisasi secara terus-menerus. Bukan saja ia harus melayani berbagai aspirasi politik baru (misalnya: multikulturalisme, feminisme, environmentalisme), tetapi terlebih ia harus mengaktifkan rasio publik agar kondisi falibilisnya tidak berhenti. Dengan kata lain, demi memelihara prinsip "kesementaraan kebenaran", ia harus bermanuver dalam "berbagai konsensus" dan menjaganya agar terus berada dalam kondisi argumentatif. Tidak cukup mengatakan bahwa demokrasi hanya dapat diselenggarakan dalam sebuah masyarakat yang argumentatif, karena justru demokrasi diperlukan untuk mengedarkan argumen dalam masyarakat yang konser-

vatif, masyarakat yang doktrinal. Keperluan itu adalah keperluan radikal bagi humanisme, yaitu penerimaan falibilitas manusia.

Di sini kita bertemu lagi dengan rasionalitas demokrasi: kebenaran politik adalah apa yang dapat disepakati dalam batas-batas bahasa manusia. Artinya, semua "proposal kebenaran" hanya boleh diedarkan dalam terminologi sosial, dan bukan dalam terminologi akhirat. Memang, demokrasi akan terus dieksploitasi oleh kegandrungan pada "yang metafisik", oleh kerinduan pada "yang belum ada", oleh pemujaan pada "yang absolut", tetapi kondisi sosiologis manusialah yang menjadi batas operasi demokrasi. Kondisi teologis manusia adalah orientasi eksklusif setiap orang yang tidak mungkin dikontestasikan dalam sistem demokrasi. Karena itu, ia berada di luar batas bahasa manusia, berada di luar wilayah konsensus demokrasi.

Bagi kita di sini, sekarang, keperluan untuk meradikalisasi demokrasi sungguh diperlukan karena pelembagaan politik kita belum menghasilkan etika toleransi. Demokrasi juga belum berhasil mendistribusikan keadilan ekonomi karena *electoral politics* telah mengungguli *citizenship politics*. Ada surplus kekuasaan di parlemen, tetapi etika parlementarian terus mengalami defisit. Kita memang menikmati *political rights* (hasil reformasi), tetapi *civil liberties* kita justru terancam oleh pandangan-pandangan kebudayaan yang absolutis.

Dalam bahasa filsafat politik hari-hari ini, kita perlu menyelenggarakan demokrasi dengan cara mempertahankan "kesementaraan abadi" dari kebenaran, sambil terus mendorong percakapan publik untuk mempersoalkan ketidakadilan dan kekerasan sosial berdasarkan ukuran-ukuran sejarah dan hak asasi manusia. Inilah program minimal

untuk menjaga ruang percakapan demokratis berlangsung dalam semangat falibilis, dan menghalau semua retorika dogmatis yang dikemas dalam jargon-jargon demokrasi. Dengan cara itu toleransi dan kemajemukan dapat dipertahankan, dan perjuangan untuk keadilan sosial dapat terus dikerjakan.

Pada akhirnya, demokrasi memang perlu bertumbuh mengikuti keperluan sejarah. Dengan memahami kritik pos-modernis (dan poststrukturalis Lacanian), demokrasi akan selalu berada dalam kondisi—istilah Guillermo O'Donnell—*the perpetual absence of something more*. Antisipasi inilah yang perlu kita manfaatkan secara strategis, sambil mempertimbangkan untuk mengisinya dengan spirit disensus politik kiri — untuk mengutip Alain Badiou: *politics is the art of attacking the impossible*. Mengaktifkan politik dengan cara ini, dapat menghindarkan kita dari pesimisme dan disilusi.***

Negara Demokrasi yang Belajar

Rizal Panggabean

Sebagai respon terhadap tulisan Goenawan Mohamad, tulisan ini ingin menunjukkan bahwa demokrasi sebagai format kelembagaan politik dapat menjadi wadah atau arena bagi demokrasi sebagai politik perjuangan. Selaras dengan ini, negara perlu dibawa ke dalam demokrasi. Ketegangan struktural antara demokrasi dan negara (dengan gagasan kedaulatannya) tidak harus dihadapi dengan menafikan, meninggalkan, atau menjauhi negara. Bagaimana pun juga, sejarah menunjukkan bahwa ketegangan tersebut adalah latar belakang bagi keagenan warganegara—baik sebagai perseorangan maupun kelompok kecil yang kreatif dan berani, dalam memperbaiki keadaan, baik melalui lembaga-lembaga politik yang ada maupun di luarnya. Tidak ada tempat yang lebih menarik dari Indonesia untuk membahas hal ini.

Walaupun hanya sesekali dan tidak perlu berlama-lama, inilah saatnya kita merayakan demokrasi di Indonesia. "Ke-